

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, lebih lanjut UUD 1945, Pasal 28H (1) dan juga UU Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sejahtera.

Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah melakukan terobosan berbagai model pembangunan salah satunya melalui pendekatan pembangunan pemberdayaan. Bagi Mardikanto (2013), Pemberdayaan dimaksudkan sebagai proses perbaikan sosial, ekonomi serta politik untuk memperkuat kemampuan masyarakat lewat proses belajar bersama yang partisipatif, supaya terjadi perbaikan sikap pada diri seluruh stake holders (individu, kelompok serta kelembagaan) yang partisipatif dalam proses pembangunan, demi merealisasikan kehidupan yang semakin kuat, mandiri, serta partisipatif yang terus menjadi sejahtera secara berkepanjangan.

Model pendekatan pemberdayaan masyarakat diterapkan bertujuan agar masyarakat terarah dan dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan secara partisipatif. Sebagaimana disebutkan Kartasmita (1997), kalau pemberdayaan masyarakat wajib menjajaki 3 pendekatan: pertama, Adanya usaha yang wajib direncanakan (Targetted). Yaitu upaya yang dilakukan tepat sasaran, Kedua, mengajak warga untuk ikutserta langsung dalam perencanaan, penerapan, serta pengawasan (monitoring) program, Ketiga, memakai pendekatan kelompok dan pendapat ini dikuatkan oleh Mardikanto (2017) Pemberdayaan mengandung makna dalam 3 perihal, yang pertama, pemberdayaan warga bisa membangun suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkreasi. kedua, menguatkan kemampuan yang dimiliki warga setempat. ketiga, memberdayakan berarti melindungi. Lebih lanjut menurut Mardikanto (2014) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat enam tujuan yang salah satunya adalah Perbaikan kelembagaan (*Better Institution*) yaitu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan

dalam pemberdayaan masyarakat dihimbau dapat memperbaiki kelembagaan di wilayah pemberdayaan.

Hal ini sejalan dengan pendekatan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yaitu menggunakan pendekatan pemberdayaan, target yang jelas, partisipatif, memfungsikan kelompok, mengembangkan potensi yang ada dan melingungi. Pendekatan kelompok sebagai wujud dari model pembangunan bertumpu pada kelompok. Kelompok sebagai satu-kesatuan yang mampu mendorong tumbuhnya solidaritas masyarakat serta mempercepat proses kegiatan di masyarakat. Pentingnya kelompok juga disebutkan Hamid (2018), bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pendekatan kelompok menjadi sangat penting, lewat kelompok data dan informasi yang terkait dengan sistem pemberdayaan dapat sampai di warga lebih cepat. Pendekatan kelompok bertujuan untuk memudahkan dalam memecahkan masalah yang dihadapinya karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit untuk menyelesaikan masalahnya sendiri (Kartasasmita, 1997)

Setiap kelompok yang dibangun memiliki tujuan dan karakteristik tersendiri, hal ini karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku yang tercermin dari anggota kelompok/organisasi itu sendiri. Sikap dan perilaku anggota kelompok disebut juga karakteristik sedangkan hubungan antar anggota kelompok disebut dinamika. Homans (1950) menyebutkan bahwa dinamika adalah studi tentang hubungan individu dalam kelompok, karena pada dasarnya perilaku kelompok adalah akibat dari kerjasama dinamis di antara anggota kelompok. Menurut Santoso (2004), Dinamika adalah perilaku timbal balik warga yang berpengaruh kepada warga lain secara langsung, dinamika berarti terdapat hubungan yang saling bergantung antara anggota satu dengan anggota yang lain secara menyeluruh

Menurut Kurt Lewin dalam Power Field Hypothesis, melihat kelompok merupakan satu kesatuan yang utuh, kesatuan ini muncul karena adanya daya tarik yang kuat antara unsur-unsur anggota kelompok itu, yang pada akhirnya melahirkan suatu gaya yang dihasilkan yang kemudian menjadi kekuatan kelompok, Kementerian Pertahanan RI, Hanjar Dinamika kelompok (2020). Selain dampak dari perilaku anggota seperti yang dirujuk oleh Kurt Lewin, keaktifan

anggota juga mempengaruhi kekuatan kelompok. Jika kelompok kuat maka kemandirian kelompok akan dapat direalisasikan.

Sebagaimana disampaikan oleh Barnadib dalam Fatimah (2008), kemandirian mencakup cara berperilaku yang berinisiatif dapat menyelesaikan hambatan/masalah, memiliki keyakinan diri untuk menyelesaikan sesuatu sendirian tanpa bantuan orang lain. Kemandirian berasal dari “Autonomy” yaitu merupakan sesuatu yang mandiri atau kemampuan untuk tetap berdiri sendiri dengan kesabaran dan tanggungjawab tentang segala cara sebagai orang dewasa dalam melakukan komitmennya untuk mengatasi masalahnya sendiri (Kartono, 2007). Dengan demikian semakin mandiri sebuah kelompok maka semakin mudah untuk mencapai keberhasilan pembangunan

Kemandirian kelompok pada program KOTAKU menjadi satu pilar penting yang ingin dicapai di masyarakat, karena seluruh tahapan kegiatan program KOTAKU dikawal oleh kelompok BKM tersebut, tahapan program yang meliputi sosialisasi, pendataan data *Baseline*, pembentukan maupun *review* kelembagaan, penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik jika memiliki kelompok yang kuat atau mandiri.

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Program KOTAKU di Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2020 telah terbentuk kelompok BKM sebanyak 355 BKM, yang tersebar di 13 Kota dan Kabupaten. Kota Padang memiliki jumlah kelompok terbanyak yaitu 104 kelompok, yang tersebar di 11 kecamatan di Kota Padang. Selain jumlah terbanyak kelompok di Kota Padang berada pada wilayah administrasi yang sama yaitu wilayah administrasi Kelurahan.

Program KOTAKU melanjutkan dan memfungsikan kelompok BKM yang telah dibentuk sejak tahun 2006 oleh program Program P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan). Beberapa program yang telah memfungsikan BKM sebagai lembaga organisasi di tingkat kelurahan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan PNPM-MP (2008), Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman P2KKP (2014), Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (2016) sampai sekarang.

Ditinjau dari umur kelompok BKM sampai sekarang telah mencapai umur antara 12-14 tahun, namun tidak semua kelompok BKM mengalami perkembangan kelompok yang sempurna, sehingga didapatkan kelompok yang aktif dan kelompok yang kurang aktif. Keaktifan kelompok BKM tentu dipengaruhi oleh peran anggota kelompok BKM itu sendiri, setidaknya keaktifan anggota BKM dapat diukur secara sederhana pada kehadiran dalam rapat anggota, hubungan dengan *stakeholders* setempat maupun kemampuan anggota kelompok dalam berkolaborasi dengan pihak lain.

Pengurus BKM yang terdiri dari koordinator, anggota, Unit pelaksana teknis yang terdiri dari Unit Pengelola Kegiatan Keuangan (UPK), Unit Pengelola Kegiatan Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Kegiatan Sosial (UPS) serta Sekretaris yang mengurus kesekretariatan BKM berperan terhadap keaktifan BKM. Hasil identifikasi keaktifan pengurus antara BKM dan unit pengelola (UP), jika diukur dengan *range* tinggi sedang dan rendah didapati hasil sebagai berikut: BKM aktif kategori tinggi; 9 kelompok, sedang ; 28 kelompok dan rendah; 67 kelompok. Sedangkan keaktifan pengelola keuangan didapati 6 unit pengelola keuangan kategori memuaskan (*satisfactory*), 6 kelompok memadai dan sisanya 89 tidak memadai bahkan didalamnya termasuk *suspend*.

Dari sandingan data diatas didapati kondisi : (1). Kelompok BKM “aktif” dengan pengelola keuangan ”aktif”, (2). Terdapat BKM “kurang aktif” dengan kondisi pengelola keuangan yang “kurang aktif”, (3). Terdapat kelompok BKM yang “aktif” dengan pengelola keuangan yang “kurang aktif”. Dan terakhir (4). Terdapat BKM yang “kurang aktif” dengan kondisi pengelola keuangan yang “Aktif”. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kelompok BKM dengan mengajukan judul: **“DINAMIKA DAN KEMANDIRIAN KELOMPOK BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok merupakan pola pembangunan masyarakat yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk berperan sebagai objek sekaligus menjadi subjek pembangunan. Sehingga

kelompok memiliki peran strategis dalam pembangunan pemberdayaan. Oleh karena itu kekuatan kelompok dan kemandirian kelompok menjadi kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Kelompok yang kuat karena unsur-unsur dinamika kelompok berfungsi dengan baik dan kelompok yang kuat berpengaruh terhadap tingkat kemandiriannya.

Mengelola kelompok dibutuhkan keseriusan, kedisiplinan serta keamanan. Oleh sebab itu, adanya pembagian tugas serta kepemimpinan kelompok BKM mutlak dibutuhkan. Sebagai sebuah organisasi, kelompok BKM memiliki struktur kepemimpinan yang terdiri dari, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Unit Pengelola. Kekompakan kelompok akan membangun kedinamisan kelompok di dalamnya. Zulkarnain (2014) mengatakan bahwa penting adanya kedinamisan dalam kelompok sebab semakin dinamis sebuah kelompok maka semakin mudah untuk mencapai tujuan.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat dinamika dan kemandirian kelompok BKM serta ingin mengetahui dan menganalisis pengaruh dinamika terhadap kemandirian kelompok BKM Program KOTAKU di Kota Padang.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas pertanyaan penelitian (*research question*) adalah:

1. Bagaimana karakteristik anggota kelompok BKM Program Kotaku di Kota Padang?
2. Bagaimana tingkat dinamika dan kemandirian kelompok BKM Program Kotaku di Kota Padang?
3. Bagaimana pengaruh Karakter anggota dan dinamika kelompok terhadap kemandirian kelompok BKM pada Program Kotaku di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik anggota kelompok BKM Program Kotaku di Kota Padang,
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat dinamika dan kemandirian kelompok BKM Program Kotaku di Kota Padang,

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter anggota dan dinamika kelompok BKM terhadap kemandirian kelompok BKM Program Kotaku di Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan khususnya bagi yang berminat pada pengembangan masyarakat (pemberdayaan) dan utamanya pada pengembangan kelompok organisasi BKM sehingga mampu menjadi referensi bagi penelitian serupa yang akan datang

2. Secara Praktis

Memberikan masukan yang bermanfaat bagi lembaga kelompok organisasi BKM yang diharapkan mampu menjadi motivasi bagi kelompok BKM lain untuk berkembang

3. Kebijakan

Memberikan masukan bagi *stakeholders* pengambil kebijakan dengan pengelolaan kelompok organisasi tetap mendapat dukungan sehingga BKM bisa *sustainable*.

